

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsi-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut upaya pemerintah menghasilkan laporan keuangan yang akurat, Pemerintah menerbitkan peraturan terhadap sistem akuntansi pemerintahan ditandai dengan terbitnya UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (1) tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya 5 tahun, disusul dengan terbitnya Undang-undang nomor 1 pasal 70 ayat (2) tahun 2004. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah, masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan, maupun bagi pengembangan profesi akuntansi dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Manfaat bagi pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar informasi yang berbasis kas.

Sesuai dengan kerangka waktu implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih baik, meningkatkan kualitas laporan keuangan, memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Sistem akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual digunakan sampai dengan tahun anggaran 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menyebutkan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, yang terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Neraca
6. Laporan Arus Kas (LA)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Akuntansi berbasis akrual akan mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Penerapan akuntansi berbasis akrual pada sektor publik tidaklah mudah. Sektor publik beroperasi dengan memberikan layanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Di Indonesia Lembaga atau organisasi yang termasuk dalam Sektor Publik terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Parpol dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan, Pendidikan dan Kesehatan, Tempat Peribadatan.

Dampak implementasi laporan keuangan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan menjadi sangat penting. Sesuai dengan informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan harus memberikan manfaat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pada Lembaga. Terdapat perbedaan konkrit dari laporan keuangan secara kas basis dengan akuntansi berbasis akrual yang penting untuk diperhatikan yaitu komponen dalam laporan keuangan. Lembaga melaporkan secara transparan besarnya sumber penerimaan yang masuk, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan operasional.

Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas Lembaga. Walaupun akuntansi berbasis akrual efektif untuk laporan keuangan, tetapi entitas belum menerapkan sepenuhnya. Metode ini diterapkannya secara bertahap.

Lembaga pendidikan XYZ termasuk kelompok organisasi sektor publik dan bergerak dalam bidang pendidikan. Lembaga ini menerapkan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan tahun takwim 2015. Upaya memberikan pelayanan yang baik guna mendukung keberhasilan usaha peningkatan mutu pendidikan adalah dengan memberikan informasi keuangan yang dihasilkan dari laporan keuangan. Mulai tahun 2015 basis akrual diterapkan pada lembaga Pendidikan XYZ dalam penyusunan Laporan keuangan.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi berbasis akrual pada Lembaga Pendidikan XYZ antara lain adalah sistem teknologi informasi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Kurangnya pemahaman karyawan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan karena dalam akrual basis pencatatannya lebih banyak dan harus di dukung data yang akurat. Komplexitas akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu hal yang dapat menjadi hambatan dan salah satu alasan timbulnya penolakan akuntansi berbasis akrual. Proses adaptasi berjalan lambat karena diperlukan pemahaman atas basis akuntansi dan yang lama ke baru, dan metode pembukuan yang berbeda.

Untuk mengatasi kendala tersebut upaya yang dilakukan oleh manajemen Lembaga Pendidikan XYZ berusaha mencari solusi antara lain dengan merencanakan program pengolahan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)

secara komputerisasi, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat laporan keuangan serta pengoperasian sistem yang telah dibuat.

Penelitian terdahulu masih dalam taraf CTA Dahlia Firdaus (2015) pada kabupaten Ngajuk, Agnes Apriani Diaz (2015) pada Pemda NTT, masih dalam taraf CTA, Nasufa Hunain Akmal (2015) pada Pemda Gunungkidul dan Kulon Progo masih dalam taraf CTA, Sony Lamonisi (2016) Pemerintah kota Tomohon masih dalam taraf persiapan, Nenry Rahmawati (2016) pada sekretariat DPRD Malang, sudah sepenuhnya menggunakan akrual basis, Fadlan Maulana (2016) pada Dinas PPKAD belum begitu efektif, Sari Zafitri (2015) pada Polyteknik Negeri Pontianak, perlu melakukan revaluasi aset, Wasis Nista Rintiani (2014), pada Pemerintah kota Surabaya, sudah sepenuhnya sesuai dengan Peraturan pemerintah, Fitria Novita (2015), pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Utara, sudah sesuai dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan tugas akhir dengan judul **“Evaluasi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Lembaga Pendidikan XYZ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual pada Lembaga Pendidikan XYZ.

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengevaluasi pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akrual sehingga dapat diketahui permasalahan yang timbul pada lembaga pendidikan XYZ. Apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kontribusi Penelitian

1). Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010), serta penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama di perkuliahan.

2). Bagi Lembaga Pendidikan XYZ, agar dapat memberikan masukan dari evaluasi penerapan akuntansi berbasis akrual terhitung tahun 2015 hingga saat ini.